



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KESEHATAN  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **ABDUL KADIR**
2. Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL**
3. NHK : **67897**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 4.134.894.000**

1. Tanah Seluas 15981 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI  
Rp. 319.620.000
2. Tanah Seluas 6177 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI  
Rp. 25.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m2/66 m2 di KAB / KOTA KOTA  
MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 330 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA  
MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 453.120.000
5. Tanah Seluas 5766 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI  
Rp. 25.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m2/228 m2 di KAB / KOTA KOTA  
MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 396.450.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 279 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA  
MAKASSAR , WARISAN Rp. 660.384.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA  
MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 562.320.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA  
MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 65 m2/65 m2 di KAB / KOTA KOTA  
MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 693.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 300.000.000**



1. MOBIL, FORTUNER VRZ TRD AT DSL Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	396.800.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.625.609.811
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	9.457.303.811
III. HUTANG	Rp.	9.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	9.448.303.811

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.